



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH**

TAHUN 2027



KATA PENGANTAR

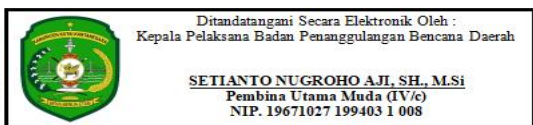
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan,

Awal nya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan kepada kami sehingga Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) adan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tenggarong, 25 Febuari 2026



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kutai Kartanegara Penyusun.....	Tentang Tim i
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Bab I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	34
Bab III. Tujuan dan Sasaran	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	40
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	43
4.1. Faktor yang menjadi Bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.	
4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan	
4.3. Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD	
4.4. Rencana program dan kegiatan
Bab V. Penutup.....	57
5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian.....	57
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	58
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.

Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2014. Permendagri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang

diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, seluruh PD di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan pada RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah maka pelaksanaan pembangunan tahun Kedua RPJMD 2025-2029 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni“ :

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Sebagai langkah upaya penyempurnaan matrik struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan di implementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 .

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 , peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2027 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)
11. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829);
12. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830);
13. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Mendagri Nomor 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
16. Peraturan Mendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.....
19. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2027 ;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2027 ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 , adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program dan kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2027 ;
2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang di inginkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1. Faktor yang menjadi Bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- 4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- 4.3. Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD
- 4.4. Rencana program dan kegiatan

Bab V Penutup

- 5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Lampiran – lampiran

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2027 , disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan, untuk menjamin setiap alokasi anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun n-2 dan Capaian Renstra Tahun 2026 :

Tabel. T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2026
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025-2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3/2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2/2025)			Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun n-1/2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan					
						Target Renja-PD tahun (n-2/2025)	Realisasi Renja-PD tahun (n-2/2025)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1/2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
1	05	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum													
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	72.60	Nilai	64.62	72.50	72.50	100%	72.52	72.52	100%		
1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	65	Dokumen	12	13	13	100%	13	13	20%	
1	05	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31	Dokumen	7	7	7	100%	6	6	19%

1	05	01	2.01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	27	Laporan	2	2	2	100%	4	4	15%
1	05	01	2.01	0009	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Sektoral Statistik Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	5	Data	1	1	1	100%	1	1	20%
1	05	01	2.01	0010	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	12	1	1	100%	0	0	0%
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	Laporan	1	1	1	100%	12	12	21%
1	05	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5251	Orang/bulan	700	700	700	100%	735	735	14%
1	05	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	12	12	100%			0%
1	05	01	2.02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Laporan	1	1	1	100%	1	1	20%

1	05	01	2.02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	60	Laporan	12	12	12	100%	12	12	20%
1	05	01	2.02	0008	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13	Laporan	0	6	6	100%	4	4	31%
1	05	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	47	Laporan	7	14	14	100%	13	13	28%
1	05	01	2.03	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	Laporan	1	1	1	100%	1	1	20%
1	05	01	2.03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35	Laporan	6	6	6	100%	12	12	34%
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan SDM	425	Orang	0	0	0	100%	125	125	29%
1	05	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	275	Paket	0	0	0	100%	125	125	45%
1	05	01	2.05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	165	Orang	0	0	0	100%	15	15	9%

1	05	01	2.05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang	0	0	0	100%	0	0	0%
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	247	Laporan	120	120	120	100%	100	100	40%
1	05	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130	Paket	10	10	10	100%	10	10	8%
1	05	01	2.06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	72	Paket	12	12	12	100%	12	12	17%
1	05	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	160	Paket	12	12	12	100%	100	100	63%
1	05	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	804	Paket	12	12	12	100%	750	750	93%
1	05	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	60	Paket	12	12	12	100%	12	12	20%
1	05	01	2.06	0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	58	Paket	12	12	12	100%	4	4	7%

1	05	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390	Laporan	30	30	30	100%	60	60	15%
1	05	01	2.06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	54	Dokumen	12	12	12	100%	6	6	11%
1	05	01	2.06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42	Dokumen	10	10	10	100%	2	2	5%
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	923	Unit	120	223	223	100%	300	300	33%
1	05	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	0	0	0	#DIV/0!	1	1	100%
1	05	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	102	Unit		2	2	100%	0	0	0%
1	05	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	395	Unit	120	120	120	100%	75	75	19%
1	05	01	2.07	0011	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500	Unit	0	100	100	100%	200	200	40%
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97	Laporan	25	12	12	100%	10	10	10%

1	05	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54	Laporan	1	50	50	100%	1	1	2%
1	05	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	12	12	100%	12	12	20%
1	05	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	12	12	100%	12	12	20%
1	05	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	190	Unit	87	87	87	100%	100	100	53%
1	05	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	371	Unit	74	74	74	100%	75	75	20%
1	05	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	420	Unit	50	50	50	100%	120	120	29%
1	05	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	15	Unit	3	3	3	100%	3	3	20%
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan	100	Persentase	18	100	56.26	56%	100	100	100%

1	05	03	2.02	0015	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	675	Unt	100	100	100	100%	275	275	41%
1	05	03	2.02	0018	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	2700	Orang	500	500	500	100%	500	500	19%
1	05	03	2.02	0019	Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30	Keluarga	10	10	10	100%	0	0	0%
1	05	03	2.02	0020	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	19	Kawasan	4	4	4	100%	3	3	16%

1	05	03	2.02	0021	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	25	Orang	25	25	25	100%	0	0	0%
1	05	03	2.02	0022	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4	Dokumen	1	1	1	100%	0	0	0%
1	05	03	2.02	0026	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1462	Laporan	2	2	2	100%	365	365	25%
1	05	03	2.02	0027	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	Dokumen	1	0	0	#DIV/0!	0	0	0%

1	05	03	2.02	0028	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	20	Kawasan	4	4	4	100%	4	4	20%
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Persentase	100	100	89.70	90%	100	100	100%
1	05	03	2.03	0001	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	5	Laporan	1	1	1	100%	1	1	20%
1	05	03	2.03	0002	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	20%
1	05	03	2.03	0003	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	22500	Orang	4500	4500	4500	100%	4500	4500	20%

1	05	03	2.03	0008	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	50	Orang	10	10	10	100%	10	10	20%
1	05	03	2.03	0009	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	17900	Orang	700	700	700	100%	700	700	4%
1	05	03	2.03	0010	Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	20%
1	05	03	2.03	0012	Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	Laporan	1	1	1	100%	1	1	20%
1	05	03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	29	Dokumen	2	2	2	100%	7	7	24%

1	05	03	2.04	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	9	Dokumen	2	1	1	100%	2	2	22%
1	05	03	2.04	0003	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	11	Dokumen	2	2	2	100%	2	2	18%
1	05	03	2.04	0004	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	15	Dokumen	1	1	1	100%	0	0	0%
1	05	03	2.04	0005	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	40	Laporan	10	10	10	100%	10	10	25%
1	05	03	2.04	0007	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	20	Orang	10	10	10	100%	0	0	0%
1	05	03	2.04	0008	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi	40	Orang	15	15	15	100%	0	0	0%

						dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)										
1	05	03	2.04	0010	Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	50	Kegiatan	10	10	10	100%	10	10	20%	
1	05	03	2.04	0012	Sub Kegiatan Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	20	Laporan	10	10	10	100%	0	0	0%	
1	05	03	2.04	0014	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	10	Dokumen	2	2	2	100%	2	2	20%	
1	05	03	2.04	0015	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana(JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana(JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R#P) Kab/Kota sampai dinyatakan sah legal paling lama dalam 1 (tahun)	10	Dokumen	2	2	2	100%	1	1	10%	

1	05	03	2.04	0016	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2	Dokumen	1	1	1	100%	1	1	50%
---	----	----	------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	---	---	---	------	---	---	-----

2.2. Analisis Kinerja pelayanan PD

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh adalah sebagai berikut :

Tabel. T-C.30.
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator*)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibunlinmas Sub Urusan Bencana			80	82	84	86	88	NA	86.19	82	84	Indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam menangani dan mengelola kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan upaya pencegahan, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi. Beberapa komponen yang mungkin termasuk dalam indeks ini antara lain: 1. Kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti pelatihan, simulasi, dan koordinasi antar instansi terkait. 2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus dilakukan saat bencana. 3. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti sistem peringatan dini dan pusat informasi bencana. 4. Tindak lanjut pasca bencana, termasuk pemulihan dan rehabilitasi bagi korban bencana. Indeks ini bertujuan untuk memastikan bahwa daerah memiliki sistem yang siap dan responsif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi, serta mampu meminimalkan dampak bencana bagi masyarakat

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Perubahan iklim global berdampak nyata dan semakin terasa terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kenaikan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan kebarakan hutan, menjadi ancaman serius bagi ketahanan wilayah ini.

Aktivitas pertambangan, deforestasi, serta alih fungsi lahan yang masih memperburuk daya dukung lingkungan dan mempercepat laju kerusakan ekosistem lokal. Dampaknya tidak hanya mengganggu aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat, tetapi juga berisiko terhadap ketersediaan air bersih, kesehatan masyarakat, serta kelangsungan pembangunan ekonomi secara umum.

Selain itu, Kutai Kartanegara sebagai wilayah yang terletak di jalur sungai besar dan memiliki kawasan pesisir, turut menghadapi risiko peningkatan permukaan air laut dan erosi pantai akibat perubahan iklim global. Ketahanan infrastruktur dasar terhadap bencana hidrometeorologi masih terbatas, sehingga kerentanan masyarakat semakin tinggi, terutama di wilayah perdesaan.

Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terpadu, seperti rehabilitasi hutan, pengendalian emisi karbon, tata ruang berbasis risiko bencana, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Investasi dalam pendidikan lingkungan dan penguatan kapasitas masyarakat lokal juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks dan berdampak lintas sektor.

Isu Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dalam Tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pengelolaan Risiko Bencana: BPBD memiliki kewenangan untuk mengelola risiko bencana di daerah, termasuk identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko.	Layanan Informasi Rawan Bencana Belum Optimal	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran, Hutan dan lahan, Tanah Longsor)	Dampak Perubahan Iklim Global	Keanekaragaman Hayati dan Potensi Lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana
Penanganan Darurat Bencana: BPBD memiliki kewenangan untuk menangani situasi darurat bencana, termasuk evakuasi, penyelamatan, dan pemberian bantuan.	Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Belum Optimal					Belum optimalnya kesiapsiagaan, tanggap bencana yang terintegrasi antar perangkat daerah, masyarakat di wilayah rawan bencana
Koordinasi dan Kerjasama: BPBD memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana.	Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Belum Optimal					
	Pelaksanaan Koordinasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Belum Optimal					

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu penyesuaian terhadap RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan terdapat kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD dan Pagu Anggaran OPD, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Sebagaimana Tabel. T-C.31. dibawah ini :

Tabel. T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif Rp	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	72.54	Nilai	18,439,450,292.72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	72.54	Nilai	18,439,450,292.72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program wajib dan strategis yang berfungsi sebagai fondasi kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	13	Dokumen	1,050,000,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	13	Dokumen	1,050,000,000.00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan kunci yang wajib, strategis, dan berkelanjutan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, anggaran, dan capaian kinerja OPD

1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13	Laporan	11,736,450,292.72	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13	Laporan	11,736,450,292.72	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan wajib dan strategis yang memastikan tertib, akurat, dan akuntabelnya pengelolaan keuangan OPD. Pelaksanaannya yang patuh regulasi, tepat waktu, dan efisien menjadi fondasi bagi kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan pencapaian SAKIP
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6	Laporan	1,970,500,000.00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6	Laporan	1,970,500,000.00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan pengelolaan aset OPD akurat, akuntabel, dan efisien, mendukung efisiensi anggaran, transparansi, dan peningkatan kinerja perangkat daerah

1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan SDM	100	Orang	800,000,000.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan SDM	100	Orang	800,000,000.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan pengelolaan SDM OPD tertib, akurat, dan akuntabel, sehingga mendukung transparansi, pengembangan karier pegawai, serta peningkatan kinerja dan capaian SAKIP OPD.
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Laporan	1,170,500,000.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9	Laporan	1,170,500,000.00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan tertibnya pengelolaan administrasi internal OPD, mendukung kelancaran operasional, efisiensi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	100	Unit	300,000,000.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	100	Unit	300,000,000.00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan pengadaan aset penunjang OPD terlaksana secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung kelancaran operasional, efisiensi anggaran, dan peningkatan kinerja perangat daerah.
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	Laporan	707,500,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25	Laporan	707,500,000.00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan pemenuhan jasa pendukung OPD terlaksana secara efisien, akuntabel, dan tepat waktu, sehingga mendukung kelancaran operasional, kualitas layanan, dan

													pencapaian kinerja perangkat daerah
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	127	Laporan	2,450,000,000.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	127	Laporan	2,450,000,000.00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan aset penunjang OPD terpelihara dengan baik, aman, dan fungsional, sehingga mendukung kelancaran operasional, efisiensi anggaran, dan peningkatan kinerja perangkat daerah.

2	Program Penanggulangan Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	Persentase	2,750,000,000.00	Program Penanggulangan Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	Persentase	2,750,000,000.00	Program Penanggulangan Bencana adalah program strategis dan wajib yang bertujuan untuk mencegah, meminimalkan, dan menanggulangi risiko bencana secara efektif. Pelaksanaannya harus terencana, terkoordinasi, berbasis data, dan akuntabel, sehingga menjamin keselamatan masyarakat, kelangsungan pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas tanggap bencana daerah
		Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	Persentase	1,620,750,318.00		Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	Persentase	1,620,750,318.00	
		Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	Persentase	990,000,000.00		Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100	Persentase	990,000,000.00	

2.1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100	Persentase	1,000,000,000.00	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100	Persentase	1,000,000,000.00	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten/Kota adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan informasi bencana tersampaikan tepat waktu, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Pelaksanaan yang berbasis data dan terkoordinasi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, sehingga meningkatkan ketahanan masyarakat dan efektivitas tanggap bencana.
-----	-----------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------	-----	------------	------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------	-----	------------	------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	Persentase	1,750,000,000.00	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	Persentase	1,750,000,000.00	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan edukasi bencana terlaksana secara efektif. Pelaksanaan yang terencana, berbasis data, dan terkoordinasi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, sehingga meningkatkan ketahanan masyarakat dan efektivitas pengurangan risiko bencana.
-----	------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------	-----	------------	------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------	-----	------------	------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Persentase	1,620,750,318.00	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Persentase	1,620,750,318.00	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan respon cepat dan tepat terhadap bencana untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Pelaksanaan yang terkoordinasi, berbasis data, dan terstandarisasi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, sehingga meningkatkan keselamatan masyarakat dan efektivitas tanggap darurat bencana
-----	-------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------	-----	------------	------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------	-----	------------	------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	6	Dokumen	990,000,000.00	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	6	Dokumen	990,000,000.00	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan sistem, prosedur, dan kapasitas penanggulangan bencana tersusun secara terstruktur dan efektif. Pelaksanaan yang terencana, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU dan IKK) perangkat daerah, sehingga meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana
-----	-------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------------	-------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak ada Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat maupun hasil dari Musrenbang tahun 2027.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi "**Bangsa yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana**" secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance..

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Menindaklanjuti kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana dengan melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekonstruksi terhadap penanggulangan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun, yaitu : **KUKAR IDAMAN TERBAIK, “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**. Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok yaitu “*Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan*”. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai berikut.

1. **Maju**, pokok visi ini berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, infrastruktur dan tata kelola. Pemerintah Daerah

berupaya menciptakan perekonomian yang inklusif dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat secara merata, sehingga akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfokuskan diri untuk memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki.

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga diimbangi dengan penguatan infrastruktur daerah seperti penyediaan akses jalan dan penataan ruang yang baik sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain itu, birokrasi pemerintahan sebagai penanggung jawab pembangunan daerah juga menjadi perhatian agar tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

2. **Sejahtera**, pokok visi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dilandasi dengan budaya kearifan lokal.

Pokok visi “sejahtera” juga diwujudkan dengan pengembangan SDM melalui penguatan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta penyediaan hunian yang layak, sehingga tercipta kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sehat, berdaya saing, dan memiliki karakter budaya yang kuat.

3. **Berkelanjutan**, Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau harus mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen menerapkan praktik ramah lingkungan melalui pengembangan industri hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Program rehabilitasi lahan kritis, pelestarian hutan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas penting dalam menjaga ekosistem.

Dari Ketiga rumusan pokok visi ini yang berhubungan dengan Tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu **Berkelanjutan**.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut :

1) **MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.**

Misi ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada pemerataan akses di seluruh wilayah

2) **MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif.**

Misi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan.

3) **MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu,

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah.

4) **MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.**

Pendidikan karakter merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pendidikan karakter masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan lingkungan.

5) **MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.**

Misi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membangun wilayah secara menyeluruh dan merata, dengan mengedepankan prinsip keadilan spasial dan pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan.

Dari 4 Misi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berhubungan dengan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Misi 4 **Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.**

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan - pilihan strategi pembangunan dan sasaran untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tujuan **Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap**

bencana daerah dengan Indikator tujuan **Indeks Ketahanan Daerah**.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah dari yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai asaran Strategi Perangkat Daerah **Meningkatnya layanan pencegahan dan perlindungan korban bencana** dengan Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah yaitu **Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana**.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi “Kukar Idaman Terbaik” serta memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan arah kebijakan strategis untuk periode 2025–2029. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan daerah terhadap berbagai potensi ancaman bencana melalui penguatan kapasitas kelembagaan, infrastruktur, sistem informasi, serta layanan perlindungan masyarakat terdampak bencana.

Dalam menyelaraskan Arah Kebijakan sesuai RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2025 - 2029 yaitu Penerapan Sistem Peringatan Dini di Daerah Rawan Bencana, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan strategis sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem peringatan dini berbasis data risiko bencana.
2. Pengembangan infrastruktur teknologi peringatan dini, seperti

sirine, sensor banjir, dan sistem informasi berbasis daring.

3. Integrasi data dan sistem peringatan dini antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BMKG, dan instansi terkait lainnya.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan, penyebarluasan informasi, dan respons cepat terhadap peringatan dini.
5. Penyusunan SOP dan simulasi berkala dalam pelaksanaan peringatan dini di daerah rawan bencana.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Faktor yang menjadi Bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendukung tercapainya target Indikator Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana” ;
- b. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/ standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 (dua) program utama dan sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Adapun

program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Awal Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
			Penyediaan Bahan/Material
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
			Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
			Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota

4.3. Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal dikarenakan

- a. Renja PD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan dalam satu tahun.
- b. Renja PD berfungsi sebagai panduan operasional untuk implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.

- c. Renja PD berisi rencana anggaran, target capaian kinerja, serta langkah-langkah pelaksanaan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.
- d. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, mengacu pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN.
- e. RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah.
- f. RKPD disusun berdasarkan visi, misi, dan program pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

4.4. Rencana program dan kegiatan

Hasil Pemetaan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2027 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tabel – TC 33 sebagai berikut :

Tabel. T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2027 Dan Perkiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				23,800,200,610.72	APBD					
1 05	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				23,800,200,610.72	APBD					
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Kab.Kutai Kartanegara	72.54	Nilai	18,439,450,292.72	APBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program wajib dan strategis yang berfungsi sebagai fondasi kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan	72.56	Nilai	18,950,763,004.30

1	05	01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Kab.Kutai Kartanegara	13	Dokumen	1,050,000,000.00	APBD	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan kunci yang wajib, strategis, dan berkelanjutan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, anggaran, dan capaian kinerja OPD	13	Dokumen	1,075,000,000.00
1	05	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	13	Laporan	11,736,450,292.72	APBD	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan kegiatan wajib dan strategis yang memastikan tertib, akurat, dan akuntabelnya pengelolaan keuangan OPD. Pelaksanaannya yang patuh regulasi, tepat waktu, dan efisien menjadi fondasi bagi kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan pencapaian SAKIP	15	Laporan	12,017,763,004.30
1	05	01	2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	6	Laporan	1,970,500,000.00	APBD	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan pengelolaan aset OPD akurat, akuntabel, dan efisien, mendukung efisiensi anggaran, transparansi, dan peningkatan kinerja perangkat daerah	7	Laporan	275,000,000.00

1	05	01	2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan SDM	Kab.Kutai Kartanegara	100	Orang	800,000,000.00	APBD	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan pengelolaan SDM OPD tertib, akurat, dan akuntabel, sehingga mendukung transparansi, pengembangan karier pegawai, serta peningkatan kinerja dan capaian SAKIP OPD.	100	Orang	300,000,000.00
1	05	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	9	Laporan	1,170,500,000.00	APBD	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan tertibnya pengelolaan administrasi internal OPD, mendukung kelancaran operasional, efisiensi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.	9	Laporan	1,210,500,000.00
1	05	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	100	Unit	300,000,000.00	APBD	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan pengadaan aset penunjang OPD terlaksana secara tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung kelancaran operasional, efisiensi anggaran, dan peningkatan kinerja perangkat daerah.	100	Unit	765,000,000.00

1	05	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	25	Laporan	707,500,000.00	APBD	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan pemenuhan jasa pendukung OPD terlaksana secara efisien, akuntabel, dan tepat waktu, sehingga mendukung kelancaran operasional, kualitas layanan, dan pencapaian kinerja perangkat daerah	25	Laporan	707,500,000.00
1	05	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Sarana dan Prasarana kantor yang dipelihara	Kab.Kutai Kartanegara	127	Laporan	2,450,000,000.00	APBD	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan wajib dan strategis yang memastikan aset penunjang OPD terpelihara dengan baik, aman, dan fungsional, sehingga mendukung kelancaran operasional, efisiensi anggaran, dan peningkatan kinerja perangkat daerah.	177	Laporan	2,600,000,000.00
1	05	03		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	100	Persentase	2,750,000,000.00	APBD	Program Penanggulangan Bencana adalah program strategis dan wajib yang bertujuan untuk mencegah, meminimalkan, dan menanggulangi risiko bencana secara efektif. Pelaksanaannya harus terencana, terkoordinasi, berbasis data, dan akuntabel, sehingga menjamin keselamatan masyarakat, kelangsungan pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas tanggap bencana daerah	100	Persentase	2,850,000,000.00

					Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	100	Persentase	1,620,750,318.00	APBD		100	Persentase	1,885,000,000.00
					Persentase Penanganan Pasca Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	100	Persentase	990,000,000.00	APBD		100	Persentase	1,700,000,000.00
1	05	03	2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	100	Persentase	1,000,000,000.00	APBD	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten/Kota adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan informasi bencana tersampaikan tepat waktu, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Pelaksanaan yang berbasis data dan terkoordinasi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, sehingga meningkatkan ketahanan masyarakat dan efektivitas tanggap bencana.	100	Persentase	1,300,000,000.00

1	05	03	2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	100	Persentase		APBD	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan edukasi bencana terlaksana secara efektif. Pelaksanaan yang terencana, berbasis data, dan terkoordinasi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, sehingga meningkatkan ketahanan masyarakat dan efektivitas pengurangan risiko bencana.	100	Persentase	1,550,000,000.00
1	05	03	2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab.Kutai Kartanegara	100	Persentase	1,620,750,318.00	APBD	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan respon cepat dan tepat terhadap bencana untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Pelaksanaan yang terkoordinasi, berbasis data, dan terstandarisasi mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, sehingga meningkatkan keselamatan masyarakat dan efektivitas tanggap darurat bencana	100	Persentase	1,885,000,000.00

1	05	03	2.04	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Kab.Kutai Kartanegara	6	Dokumen	990,000,000.00	APBD	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana adalah kegiatan strategis dan wajib yang memastikan sistem, prosedur, dan kapasitas penanggulangan bencana tersusun secara terstruktur dan efektif. Pelaksanaan yang terencana, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU dan IKK) perangkat daerah, sehingga meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana	7	Dokumen	1,700,000,000.00
---	----	----	------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---	---------	----------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	------------------

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 . Proses penyusunan RKPD Tahun 2027 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah. mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai.
2. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.
3. Jumlah sumber daya aparatur bersertifikasi yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di daerah.
4. intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang- Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan

tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

c. Rencana tindak lanjut

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari Hasil Musrenbang Kabupaten. Penyempurnaan matrik Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah target setting dari pencapaian indikator kinerja.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tenggarong, 25 Februari 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH